BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten memiliki Indeks Ketimpangan yang cukup tinggi dan tingkat perkembangan wilayah yang rendah.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode Kuantitatif untuk menganalisis data yang berupa data kuantitatif berupa angka-angka dengan analisis tipologi klassen. Tipe penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti.

3.3. Populasi & Sampel Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Sidoarjo. Penentuan Kabupaten Sidoarjo sebagai pilihan lokasi penelitian dengan dasar pertimbangan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki kondisi ketimpangan secara sosial pada 5 tahun terakhir. Populasi yang menjadi target penelitan adalah keseluruhan kecamatan/desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jenis sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Pengertian sampel jenuh atau definisi sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Ahmad, 2015). Sampel jenuh dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yang akan dianalisis pada indikator pembangunan, baik secara spasial, maupun secara sectoral.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Ditinjau dari segi sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dapat diperoleh dari data statistic, arsip, literatur, dokumen, serta jurnal yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini diposisikan sejalan dengan klasifikasi penelitian yang tergolong sebagai penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian perpustakaan menurut Pujileksono (2016) merupakan penelitian yang sebagian besar prosesnya dilakukan di perpustakaan dengan cara mengkaji/menganalisis data yang tersedia dalam bentuk dokumen/arsip. Serupa dengan definisi tersebut, penelitian ini memang berfokus pada telaah data-data sekunder yang telah tersedia.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan sebagian atau keseluruhan data yang telah tersedia atau dapat berupa laporan data yang berasal dari penelitianpenelitian terdahulu. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan segala bentuk catatan, laporan maupun buku yang memiliki korelasi dengan penelitian , diamping itu juga menggunakan data-data statistik yang dapat mendukung penelitian ini. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BPS Kabupaten Sidoarjo dan PDRB Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo.

3.5. Sumber Data

Ditinjau dari segi sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2018) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dapat diperoleh dari data statistik, arsip, literatur, dokumen, serta jurnal yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah Data sekunder yang diperoleh dari buku panduan, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BPS Kabupaten Sidoarjo.

3.6. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Matriks Definisi Operasional Variabel

| Tabel 3.1 Wattiks Definisi Operasional variabel | | | | |
|---|----------|---|--|--|
| Variabel | Idikator | Instrumen | | |
| Sektor | Sektoral | 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | | |
| Potensial | | 2. Pertambangan dan Penggalian | | |
| Kabupaten | | 3. Industri Pengolahan | | |
| Sidoarjo | | 4. Pengadaan Listrik dan Gas | | |
| | | 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, | | |
| | | Limbah. | | |
| | | 6. Konstruksi | | |
| | | 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi | | |
| | | Mobil | | |
| | | 8. Transportasi dan Pergudangan | | |
| | | 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan | | |
| | | Minum | | |
| | | 10. Informasi dan Komunikasi11. Jasa Keuangan dan Asuransi12. Real Estate13. Jasa Perusahaan | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan | | |
| | | dan Jaminan Sosial Wajib | | |
| | | 15. Jasa Pendidikan16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial17. Jasa Lainnya | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sumber: Diadaptasi dari Rustiadi, 2011

3.6.1. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah Menurut Nadiroh (2009) Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing—masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda.

Karena itu, tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (*Development Region*) dan wilayah terbelakang (*Underdevelopment Region*). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Karena itu, aspek ketimpangan pembangunan antar wilayah ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Hipotesa Neo-Klasik pada permulaan proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu, bila proses pembangunan terus berlanjut, maka secara berangsur—angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan menurun. Berdasarkan hipotesa ini, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa pada negara—negara sedang berkembang umumnya ketimpangan pembangunan 33 antar wilayah cenderung lebih tinggi, sedangkan pada negara maju ketimpangan tersebut akan menjadi lebih

rendah. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (*Reserve U-shape Curve*)

3.6.2. Ketimpangan Antar Wilayah Sektoral

Ketimpangan spasial merupakan perbedaan yang dirasakan oleh masyarakat pada unit-unit spasial pada suatu wilayah, dimana beberapa unit spasial dapat menikmati fasilitas umum dan infrastruktur yang layak dan terjangkau sementara beberapa lainnya tidak dapat menikmati (Kanbur dan Venables, 2005). Menurut Lay (1993) indikator ekonomi ketidakmerataan wilayah terbagi atas:

- Fisik: Ketersediaan sarana sosial ekonomi seperti sarana kesehatan, pendidikan dan sarana perekonomian.
- 2. Ekonomi: Kemampuan ekonomi penduduk yang terlihat dari tingkat kesejahteraan keluarga pada masing-masing kecamatan.
- 3. Sosial: Jumlah penduduk dan kualitas penduduk berdasarkan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan spasial merupakan perbedaan yang dirasakan masyarakat pada unit-unit spasial tertentu dapat ditinjau dari indikator fisik, sosial dan ekonomi, dimana beberapa unit spasial dapat menjangkau dan menikmati pelayanan publik yang layak sementara unit spasial lainnya tidak merasakan hal yang sama.

3.7. Analisis Data

Untuk mengukur ketimpangan wilayah secara spasial, sectoral dan capital digunakan 2 (dua) alat yaitu:

3.7.1. Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Spasial

Analisis tipologi klassen wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola pertumbuhan ekonomi daerah. Gambaran klasifikasinya sebagai berikut:

- 1. Wilayah yang maju dan tumbuh dengan cepat (Rapid Growth Region);
- 2. Wilayah maju dan tertekan (Retarted Region);
- 3. Wilayah yang sedang tumbuh (*Growth Region*);
- 4. Wilayah yang relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*).

Tabel 3.2 Analisis Tipologi Klassen Wilayah

| Pendapatan Per Kapita | PDRB Kecamatan lebih | PDRB Kecamatan lebih |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| (Y) | kecil dan Kontribusi | besar dari Kontribusi |
| | PDRB | PDRB |
| Laju Pertumbuhan | Yi < Y | Yi > Y |
| Ekonomi (r) | | |
| PDRB Kecamatan lebih | Berkembang | Daerah Maju dan Cepat |
| besar dari Laju | _ | Tumbuh |
| pertumbuhan PDRB | | |
| Kabupaten ri > r | | |
| Laju pertumbuhan PDRB | Daerah Relatif | Daerah Maju tapi |
| Kecamatan lebih Kecil | Tertinggal | Tertekan |
| dari Laju pertumbuhan | | |
| PDRB Kabupaten ri < r | | |

Sumber: Diadaptasi dari Sjafrizal, 2008

Keterangan:

ri : laju pertumbuhan PDRB di Kecamatan r : pertumbuhan PDRB rata-rata Kabupaten

Yi: PDRB per kapita kecamatan Y: PDRB perkapita Kabupaten

3.7.2. Analisis Ketimpangan Antar Wilayah Sektoral

Analisis Tipologi Klassen Sektoral digunakan untuk mengetahui gambaran pola dan struktur pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi. Hasil dari analisis ini mengklasifikasikan laju pertumbuhan sektor ekonomi berdasarkan tingkat perkembangannya yaitu sektor yang cepat maju dan tumbuh cepat, sektor yang

berkembang dengan cepat, sektor maju tetapi tertekan dan sektor yang relatif tertinggal.

Tabel 3.3 Analisis Tipologi Klassen Sektoral

| 1 410 01 0 10 | Tabel 5.5 Ithansis Tipologi Riassen Sektoral | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| Kontribusi (Y) | Kontribusi sektor i di | Kontribusi sektor i di | | | | |
| Pertumbuhan (r) | Kecamatan lebih kecil | Kecamatan lebih besar | | | | |
| | dari Kontirbusi | dari Kontribusi | | | | |
| | Kabupaten | Kabupaten | | | | |
| | | | | | | |
| | yik < yi | yik > yi | | | | |
| Laju pertumbuhan sektor | Potensial | Sektor Maju dan Cepat | | | | |
| i Kecamatan lebih besar | | Tumbuh | | | | |
| dari laju pertumbuhan | | | | | | |
| Kabupaten rik > ri | | | | | | |
| Laju pertumbuhan sektor | Sektor Relatif Tertinggal | Sektor Maju tapi | | | | |
| i Kecamatan lebih besar | | Tertekan | | | | |
| dari laju pertumbuhan | | | | | | |
| Kabupaten rik < ri | | | | | | |

Sumber: Diadaptasi dari Sjafrizal, 2008

Keterangan:

rik: laju pertumbuhan sektor (i) di kecamatan (k)

ri: laju pertumbuhan sektor (i) Kabupaten

yik: kontribusi sektor (i) terhadap nilai produksi total PDRB Kecamatan (k) yi: kontribusi sektor (i) terhadap nilai produksi total PDRB Kabupaten (k)